



# Parkir Balai Kota Semakin Sesak

Anggarkan Rp 10 M untuk Tambah Kendaraan Dinas

JOGJA - Tempat parkir Balai Kota Jogja akan tambah sesak. Dalam rencana APBD Perubahan 2017, Pemkot Jogja sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk pengadaan kendaraan dinas, baik kendaraan dinas jabatan maupun operasional.

Pengadaan mobil dinas jabatan juga disesuaikan dengan perubahan organisasi perangkat daerah (OPD) baru, yang belum memiliki mobil dinas.

Hasil perubahan OPD baru awal tahun lalu, terdapat beberapa OPD baru, seperti Dinas Kebakaran, Dinas Perumahan dan Tata Ruang; Dinas Pertanian dan Pangan; Dinas Pariwisata; Dinas Kebudayaan; dan Dinas Pemuda dan Olahraga.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja Kadri Renggono mengaku ada sekitar tujuh OPD baru yang belum memiliki kendaraan dinas jabatan untuk kepala dinas. Serta akan ada peremajaan untuk sejumlah

**Kendaraan dinas ini kan untuk menunjang kinerja, wajar saja kalau diadakan selama sesuai peruntukannya."**

SUJANARKO  
Ketua DPRD Kota Jogja

kendaraan dinas operasional seperti di Dinas Perhubungan. Juga untuk memenuhi kebutuhan DPRD Kota Jogja.

"Melalui APBD Murni sudah dilakukan pembelian dua kendaraan dinas untuk RS Jogja dan Satuan Polisi Pamong Praja," jelasnya kemarin (4/9).

Selain kendaraan dinas roda empat, melalui APBD Perubahan 2017 ini juga sudah disiapkan untuk pengadaan kendaraan dinas roda dua. Bahkan untuk roda dua jumlahnya lebih banyak dibandingkan roda empat.

Meski dilakukan pada APBD Perubahan, yang waktunya terbatas, Kadri mengaku optimistis tetap terlaksana.

"Paling tidak untuk pengadaan seluruh kendaraan dinas

butuh waktu sekitar tiga bulan sebelum tutup tahun anggaran dengan memanfaatkan e-katalog," jelasnya.

Anggaran untuk pembelian kendaraan dinas jabatan dan operasional masuk dalam urusan keuangan, yang dalam rencana APBD Perubahan 2017 mencapai Rp 15,9 miliar sehingga anggaran untuk urusan tersebut mencapai Rp 129,6 miliar.

Pos belanja daerah pada anggaran perubahan 2017 meningkat sekitar Rp 30 miliar yang terdiri dari pos belanja langsung mengalami kenaikan Rp32,3 miliar dan belanja tidak langsung berkurang Rp2,3 miliar.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Jogja Sujanarko mengatakan tidak masalah dengan penandatanganan kendaraan dinas baru, selama digunakan untuk menunjang pekerjaan. Tidak hanya bagi eksekutif, Koko, sa-paannya, juga berharap lembaga yang dipimpinnya mendapatkan tambahan kendaraan dinas operasional untuk alat kelengkapan.

"Kendaraan dinas ini kan untuk menunjang kinerja, wajar saja kalau diadakan selama sesuai peruntukannya," ungkapnya. (pra/ila/er)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005